



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DJAGAL WISESO MARSENSO
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEMAHasiswaan
3. NHK : 198204

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 4.610.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 161 m²/148 m² di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
2. Tanah Seluas 186 m² di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 208 m² di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 31 m²/31 m² di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 34 m²/34 m² di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 505.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 34 m²/34 m² di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 505.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 430.000.000

1. MOBIL, HONDA CIVIC SEDAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 71.525.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 105.000.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 3.263.617.209**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 8.480.142.209



III. HUTANG

Rp. 200.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 8.280.142.209

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.